

EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN PENDIDIKAN

(PROGRAM INDONESIA PINTAR/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH) DALAM MENGATASI ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DAN PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR/ANGKA PARTISIPASI MURNI (APK/APM) DI INDONESIA¹

EVALUATION OF EDUCATION ASSISTANCE POLICIES (SMART INDONESIA PROGRAM/SCHOOL OPERATIONAL ASSISTANCE) IN OVERCOMING OUT-OF-SCHOOL CHILDREN (ATS) AND INCREASING GROSS PARTICIPATION RATES/NET PARTICIPATION RATES (APK/APM) IN INDONESIA

Muhammad Ivan²

Email: Ivansky5981@gmail.com

ABSTRACT

The success of investing in education assistance through Program Indonesia Pintar (PIP) and Bantuan Operasional Sekolah (BOS) is not enough just to use a single parameter, namely only measuring the amount of funds that have been channeled, but on the accuracy of the use of funds and also the discretionary efforts made by schools to carry out supervision so that aid funds are not diverted or misused. Very wrong investment, if the aid program reaches hundreds of trillions of rupiah, but there is no evaluation at all to measure the extent of the assistance program's performance and impact. Increase in Gross Participation Rate/Net Enrollment Rate (APK/APM) and efforts to reduce the number of children dropouts (ATS) are the outcome of the success or failure of the PIP and BOS programs so far. Historically, since the implementation of PIP in 2014 and BOS in 2005 there has not been a comprehensive evaluation of the two aid programs to date. The results showed that the implementation of PIP and BOS was not significantly able to increase APK/APM and reduce the number of ATS.

Keywords: Education Assistance (PIP/BOS), School Dropouts (ATS), Gross Enrollment Rate/Net Enrollment Rate (APK/APM)

ABSTRAK

Keberhasilan investasi pada bantuan sosial pendidikan pemerintah melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak cukup hanya

¹ Diterima 03 April 2024, Direvisi 26 Juni 2024

² Analis Kebijakan pada Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Deputi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

mengukur pada jumlah dana yang tersalurkan, melainkan pada ketepatan penggunaan dana dan juga upaya diskresi yang dilakukan sekolah untuk melakukan pengawasan agar dana penggunaan bantuan tidak diselewengkan atau digunakan di luar dari komponen. Investasi yang sangat keliru, jika program yang sudah menyalurkan bantuan sampai ratusan triliunan rupiah, namun tidak ada sama sekali evaluasi untuk mengukur sejauh mana kinerja dan dampak yang sesuai dengan tujuan program tersebut. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/ APM) dan upaya menekan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi outcome dari berhasil atau tidaknya program PIP dan BOS selama ini. Dalam sejarahnya, sejak PIP tahun 2014 dan dan implemntasi BOS tahun 2005 belum ada evaluasi komprehensif terhadap kedua program bantuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2015-2022, implementasi PIP dan BOS masih belum mampu meningkatkan APK dan menekan jumlah ATS.

Keywords: Bantuan Pendidikan (PIP/BOS), Anak Tidak Sekolah, Angka Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/ APM)

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, kondisi pendidikan di Indonesia belum sesuai dengan amanat Undang-undang. Pemerataan pendidikan masih menjadi tanda tanya di sebagian wilayah Indonesia, terkhusus Indonesia Timur. Transformasi pendidikan menghadapi dua dimensi utama yang menjadi permasalahan terkhusus di Indonesia, yaitu upaya memperluas akses pendidikan dan pemerataan pendidikan (Hakim, 2016). Kesenjangan pendidikan mencakup dua aspek: mutu pendidikan dan kuantitas institusi pendidikan (akses, persebaran sekolah, rasio jumlah sekolah terhadap penduduk) (Wiratama, 2015).

Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa 6,70% penduduk usia 5 tahun ke atas tidak atau belum pernah bersekolah (BPS, 2018). Selain itu, tingkat buta aksara masih tinggi di enam provinsi di Indonesia bagian timur, yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara (NTT dan NTB), Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua

dengan angka di atas 4% (BPS, 2018; Nugraheny, 2019).

Dalam hal kualitas sumber daya manusia, berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis oleh UNDP, Indonesia tertinggal jauh dari Singapura yang menduduki peringkat ke-11 dunia dengan predikat HDI sangat tinggi. Indonesia juga tertinggal dibandingkan Brunei dan Malaysia dalam semua aspek yang dinilai (UNDP, 2021).

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya jumlah siswa yang ikut serta dalam pendidikan, seperti ketiadaan daya beli keluarga, rendahnya kesadaran orang tua untuk melanjutkan anak ke sekolah, faktor lingkungan masyarakat, dan kepedulian orang tua (Malik & Sumarno, 2016; Mua et al., 2017; Shemi, 2019). Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Pada September 2020, proporsi penduduk miskin sebesar 10,19% atau sekitar 27,55 juta jiwa (BPS, 2021). Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk melanjutkan studi, seperti yang

ditunjukkan oleh penelitian Muttaqin (2017) tentang kemampuan rumah tangga dalam membiayai pendidikan anaknya.

Di tingkat rumah tangga, kami memperkirakan bahwa pendapatan, investasi pendidikan, tingkat pendidikan orang tua, struktur rumah tangga, dan jarak ke sekolah merupakan faktor penting dalam keputusan orang tua mengenai pendidikan. Investasi melalui bantuan sosial pendidikan memberikan jaminan dan peluang yang layak bagi anak dari kalangan kurang mampu. Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) merupakan dua program unggulan dan prioritas yang sudah berjalan 6 tahun (PIP dimulai tahun 2014) dan 18 tahun (BOS dimulai tahun 2005).

Latar belakang kebijakan dana BOS dimulai pada tahun 2005. Pada tahun tersebut terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memicu pemerintah menekan subsidi BBM. Sementara itu, PIP adalah salah satu bantuan sosial pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pada awal pelaksanaannya, PIP diberikan untuk siswa dalam bentuk tunai dengan latar belakang ekonomi lemah atau kemiskinan yang rentan. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Dana ini bertujuan membantu siswa melengkapi biaya yang tidak ditanggung oleh dana BOS, seperti perlengkapan pakaian seragam, sekolah, sampai transportasi.

Investasi ini pada dasarnya adalah tanggung jawab pemerintah. Sebagaimana disyaratkan UUD 1945, Pasal 34 mengatur bahwa pemerintah mempunyai kewajiban melindungi

anak-anak miskin dan terlantar dengan menyelenggarakan sistem kesejahteraan sosial. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat rentan. Pemberian perlindungan sosial diprioritaskan kepada mereka yang hidupnya tidak layak kemanusiaan dan mempunyai parameter problem social, contohnya kemiskinan, keterlantaran, cacat, keterasingan, degradasi sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi (Peraturan Pemerintah No. 39/2012).

BOS telah diberikan oleh pemerintah kepada seluruh sekolah negeri dan swasta mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK sebagai cara pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan gratis, untuk mendukung wajib belajar 9 tahun (Rubiyati & Ismanto, 2020). Persentase penggunaan dana BOS sebagian besar digunakan untuk pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Adanya program BOS bertujuan mengurangi beban ekonomi orang tua (Theresia, 2021).

Sementara PIP diakui keberhasilannya oleh lembaga survei nasional yang dirilis pada Januari 2019, di mana PIP menempati peringkat kedua sebagai program yang paling menyentuh masyarakat secara langsung, setelah Program Indonesia Sehat. Ke depannya, target penerima PIP akan terus ditambah sebagai penguatan pemerintah menyiapkan calon sumber daya manusia yang kompeten dan memperkuat program Wajib Belajar 12 Tahun.

Perbedaan kebijakan antara BOS dan PIP terletak pada penerima dan pemanfaatannya. Berdasarkan

Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia untuk satu tahun. Biaya tersebut menjadi salah satu bagian dana pendidikan keseluruhan agar satuan pendidikan dapat menjalankan program pendidikan dengan teratur dan berkelanjutan sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP).

PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) memfokuskan pada bantuan tunai kepada peserta didik yang berada di usia 6-21 tahun, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Jelasnya, penerima dana BOS adalah institusi pendidikan, sedangkan penerima dana PIP adalah siswa.

Dengan dua program bantuan tersebut selayaknya jumlah anak tidak sekolah dapat ditekan dan tingkat partisipasi sekolah semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan evaluasi terhadap program PIP dapat memastikan anak tidak putus sekolah dan mengakomodir siswa yang terlanjur sudah tidak lagi bersekolah (putus sekolah). Namun, ketidakmampuan sekolah ada pada sulitnya melacak penggunaan dana PIP siswa. PIP belum maksimal mengcover pembiayaan personal siswa karena hanya mampu mengakomodir sebesar 55-58% yang memicu sebagian sekolah melakukan diskresi dengan upaya agar bantuan tersebut dapat diawasi dan digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan pendidikan.

Dalam jenjang pendidikan, kedua bantuan tersebut dinilai belum

mampu mengakomodir anak yang drop out dan tidak sekolah, sebagaimana riset Uriyalita, 2020; Akbar, 2021; Asnawi, 2021; Sholikhah, 2018) yang menyatakan bahwa Pada tingkat pendidikan menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya efektif pada tingkat SMP dan SMA. Kebijakan ini tidak mampu mengatasi siswa yang putus sekolah dan tidak bersekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar (Uriyalita, 2020; Akbar, 2021; Asnawi, 2021; Sholikhah, 2018).

Berdasarkan hasil Susenas (2015), bantuan untuk siswa SMP sederajat hanya cukup untuk menutupi sekitar 55% biaya pribadi siswa. Oleh karena itu, sudah sewajarnya orang tua harus terus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya.

Secara faktual, dana BOS sebenarnya tidak berjalan sesuai harapan, namun fakta di lapangan tidak semua siswa mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan terbebani dengan biaya pendidikan seperti biaya sekolah. Tentu masih ada berbagai biaya yang perlu dibebankan pada siswa karena faktor-faktor tertentu. Padahal, kebijakan BOS sejatinya dapat meminimalisir masyarakat miskin yang memang layak dibantu.

Peneliti melihat bahwa permasalahan ini wajar terjadi terkhusus aspek pengawasan masih belum berhasil karena belum ada pengawasan dari inspektorat daerah terhadap pihak komite sekolah dan satuan pendidikan secara berkala (Masita, 2015; Hidayah, 2022; Hakim, 2020) bahwa aktifitas evaluasi oleh pihak komite sudah dilakukan meskipun belum maksimal. Selain itu, dana BOS belum dapat mengakomodir

seluruh pendanaan sehingga membuat sekolah melakukan diskresi dengan mencari pendanaan-pendanaan tambahan yang kreatif dalam menutupi kekurangan dana BOS.

Kaitan dengan kreatifitas sekolah untuk mencari pendanaan lain didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan BAB I pasal 2 ayat (1) menyatakan: "pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat".

B. KAJIAN LITERATUR

Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi salah satu inisiatif program pemerintah yang berdampak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Pada tahap awal pelaksanaannya, bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk mendukung pembiayaan pendidikan mereka. Investasi melalui bantuan sosial ini dapat dinilai berhasil namun ketepatan penggunaannya dan upaya sekolah dalam mengawasi agar dana tersebut tidak diselewengkan atau digunakan di luar tujuan belum terlalu signifikan diperhatikan. Investasi ini akan sia-sia jika program yang telah menyalurkan bantuan hingga ratusan triliun rupiah tidak dievaluasi untuk mengukur kinerjanya dan dampaknya. Di tahun 2021, Kemendikbudristek melakukan terobosan dengan menetapkan alokasi dana BOS yang majemuk. BOS majemuk merupakan kebijakan pendanaan BOS dengan variasi nilai sesuai tingkat kemahalan di daerah. Kebijakan BOS majemuk berbeda karena menghususkan daerah tertentu dengan prinsip berkeadilan sosial bagi masyarakat

yang paling membutuhkan. Misalkan di daerah dengan indeks kemahalan tinggi seperti Papua, Maluku atau daerah kepulauan maka akan mendapatkan besaran Dana BOS dengan jumlah bantuan lebih banyak. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS bahwa secara umum terdapat transformasi Dana BOS yang dilakukan dengan perubahan empat mekanisme yaitu penyaluran Dana BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan Dana BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan Dana BOS meningkat, serta pelaporan Dana BOS lebih transparan dan akuntabel.

Hasil dari kebijakan mekanisme penyaluran dana BOS langsung ke rekening sekolah sejak tahun 2020 itu telah mendapat tanggapan positif dan mampu mengurangi tingkat keterlambatan rata-rata 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Dalam survei Kemendikbud yang diikuti oleh 85,5 persen responden sekolah dan 96,1 persen responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan.

Dampak bantuan sosial pendidikan dapat dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) serta pengurangan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi indikator keberhasilan program PIP dan BOS. Sejak implementasinya pada 2014 (PIP) dan 2005 (BOS), belum ada evaluasi komprehensif terhadap kedua program tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PIP dan BOS dari 2015 hingga 2022 belum mampu secara

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia●

signifikan meningkatkan APK dan menekan jumlah ATS.

Menjadi penting untuk dicermati bahwa dua program bantuan sosial pendidikan ini belum mendapat evaluasi secara komprehensif apabila dikaitkan dengan peningkatan angka partisipasi kasar dan kemampuan dampak program untuk menekan jumlah anak tidak sekolah. Meskipun program PIP dan BOS telah memberikan dampak positif, masih terdapat tantangan dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaannya.

Evaluasi komprehensif diperlukan untuk mengukur keberhasilan program ini dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi jumlah anak tidak sekolah. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kebijakan dan program pendidikan guna mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan yang lebih baik di seluruh Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kepustakaan (*library research*) untuk mendeskripsikan dan melakukan penilaian (evaluasi) terhadap pelaksanaan pengelolaan dana bantuan sosial pendidikan, yaitu Program Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah. Berbagai data didapat dengan studi literatur dari sejumlah referensi seperti artikel, jurnal, tugas akhir atau penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pelaksanaan PIP dan BOS.

Menurut Kaelan (2010), terdapat dua tahap teknik analisis data pada penelitian kepustakaan (*library research*). *Pertama*, yaitu melakukan analisis data

pada saat pengumpulan yang diharapkan mendapat esensi dari fokus penelitian yang akan dilakukan dengan berbagai sumber yang sudah terkumpul. *Kedua*, yaitu melakukan analisa ulang setelah data terkumpul baik berupa data mentah yang dihubungkan dengan lainnya. Melalui mekanisme tersebut, model analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), display data serta gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

D. PEMBAHASAN

Permasalahan terbesar dalam pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini adalah memastikan masyarakat mendapatkan layanan Pendidikan, terkhusus mereka yang menghadapi kendala keuangan. Perbedaan pendidikan antar kelompok masyarakat masih cukup besar. Keluarga kaya secara ekonomi cenderung memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan keluarga miskin. Salah satu penyebabnya adalah mahalannya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan menyebabkan banyak siswa yang putus sekolah dan meningkatkan jumlah putus sekolah sehingga berdampak pada tingkat APK. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program, termasuk PIP.

Pemerintah menerbitkan Inpres RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Tabungan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Keluarga Indonesia Sehat Produktif untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah dengan menjamin akses

layanan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan keuangan dengan memberikan bantuan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga miskin atau rentan. Angka putus sekolah memiliki hubungan yang erat dengan angka partisipasi pendidikan. Tingginya Angka Partisipasi Sekolah (APS) berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi pendidikan. Target angka partisipasi pendidikan yang harus dicapai pada tahun 2019 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kemdikbud 2014-2019. Pada tahun 2014, rata-rata APK SD mencapai 97,31%, APK SMP 74,29%, dan APK SM 68,92%. Target yang harus dicapai pada tahun 2019 adalah APK SD sebesar 100,55%, APK SMP 83,77%, dan APK SM 85,71%. Demikian pula, kondisi Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2014 dan target APM pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar yang harus diatasi.

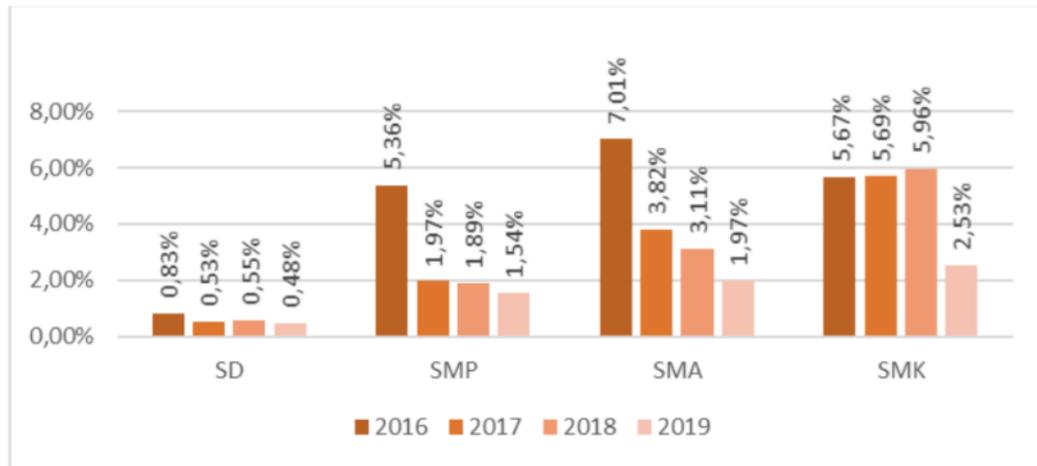
Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program atau proyek, maka diperlukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program atau proyek tersebut. Menurut Hikmat (2004), evaluasi adalah proses mengevaluasi pencapaian tujuan dan mengidentifikasi permasalahan kinerja proyek untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek. Singkatnya, ada

dua konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program, yaitu efektivitas dan efisiensi.

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang dimulai pada tahun 2014 dan diatur berdasarkan Inpres no. 7 Tahun 2014. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah dalam menjamin seluruh kelompok masyarakat mempunyai akses terhadap layanan pendidikan. Fakta menunjukkan bahwa sesuai rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024, pada tahun 2018 masih terdapat sekitar 4,4 juta anak usia 7-18 tahun yang tidak atau tidak dapat mengenyam pendidikan. Survei sosio-ekonomi Badan Statistik (Susenas) juga menunjukkan rendahnya partisipasi sekolah akibat putus sekolah menengah. Kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih menjadi permasalahan besar.

Kajian Hasan (2021) menunjukkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) berdampak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, cakupan penerima PIP harus lebih diperluas untuk mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia bagian timur. Secara umum Angka Putus Sekolah (APTS) di semua jenjang terkhusus dasar dan menengah pada periode 2015-2019 mencatat tren menurun sebagaimana grafik 1.

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia ●



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Grafik 1. Angka Putus Sekolah tahun 2015-2019

Grafik 1 menunjukkan bahwa terdapat sedikit fluktuasi Angka Putus Sekolah (APTS) pada jenjang lembaga pendidikan dasar dan kejuruan pada tahun 2018-2019. Namun jika dibandingkan APTS tahun 2016 dan tahun 2019, terjadi penurunan yang cukup signifikan terutama pada jenjang SMA sebesar 72 persen, dari 7,01 persen menjadi 1,97 persen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melaporkan, penurunan APTS yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2018, khususnya di tingkat SMA, disebabkan oleh Program Indonesia Pintar (PIP), salah satu program prioritas nasional.

Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan program lain untuk memastikan anak usia sekolah tetap berada di satuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan dan dukungan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), dan subsidi penyediaan asrama sekolah bagi siswa berbakat dan mahir serta renovasi ruang kelas.

Penelitian Rizky (2021) mengidentifikasi beberapa kendala dalam pelaksanaan PIP, salah satunya

adalah kuota penerima bantuan yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pelajar yang membutuhkan. Kendala lain adalah stigma sosial, di mana orang tua siswa merasa malu mengakui status sosial dan ekonomi mereka.

Terkait dana BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2020, dengan mentransfer dana langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga memperkenalkan pelaporan online yang lebih praktis dan menawarkan fleksibilitas dalam penggunaan dana VSP untuk berbagai kebutuhan sekolah. Penyaluran dana BOS langsung ke sekolah mendapat tanggapan positif dan berhasil mengurangi tunggakan tunai sekitar 32%, yaitu tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019. Bahkan 85% responden melihat mekanisme ini terjadi di sekolah dan 96% di pemerintah kota.

Perubahan lain dalam perhitungan dana BOS adalah penyesuaian berdasarkan indeks

kemahalan daerah, sehingga daerah dengan indeks kemahalan tinggi, seperti Papua dan Maluku, mendapatkan dana BOS per anak lebih banyak. Hal ini bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan dalam alokasi dana BOS di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Permasalahan penting lainnya yang perlu diatasi adalah kesenjangan angka partisipasi pendidikan antar daerah dan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Rata-rata angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah di wilayah Indonesia bagian timur masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan jauh lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di wilayah barat. Perbedaan angka partisipasi pendidikan pada tingkat menengah atas juga masih besar antar kabupaten/kota yaitu sebesar 29%.

Semakin masih tingginya APTS dan persoalan ketimpangan dalam APK dan APM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan gerakan anti putus sekolah pada tahun 2013. Di tahun 2012, sebanyak 1,5 juta anak pun tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan tinggi. Selain memperbaiki mekanisme penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penanganan penurunan putus sekolah juga akan membantu siswa miskin. Saat

itu, tercatat 8 juta anak dari SD hingga SMA mendapat bantuan siswa miskin dengan total anggaran sekitar Rp 4 triliun, namun jumlah tersebut tidak menjangkau seluruh siswa miskin pada tahun tersebut. (Koran Pendidikan Kemdikbud, 2013).

Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam PIP ini untuk memenuhi mutu yang baik, diantaranya seperti **ketepatan sasaran penerima PIP** yang dirasa masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penerima PIP yang berhak. Pada program ini diketahui bahwa hasil yang didapat dari PIP ini hanya sebatas **peningkatan kuantitas keuangan peserta didik**, namun tidak **memperhatikan kualitas keuangan peserta didik dalam menempuh pendidikannya**, seharusnya adanya pengarah dan pengawasan oleh pihak berwenang seperti dinas pendidikan dan pihak sekolah untuk berkomitmen membantu peserta didik dalam mengelola dana bantuan tersebut sehingga tujuan PIP ini terlaksana dengan maksimal. Ditambah rata-rata peserta didik tidak mengetahui tentang adanya beasiswa KIP Kuliah yang diperuntukkan untuk siswa/calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dan merupakan bantuan pendidikan lanjutan dari PIP ini.

Tabel 1.
APK/APM Tahun 2015-2021

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | APK | APM |
| SD/ sederajat | 110,50 | 96,70 | 109,31 | 96,82 | 108,50 | 97,19 | 108,61 | 97,58 | 107,36 | 97,64 | 106,32 | 97,80 | 106,20 | 97,80 |
| SMP/ sederajat | 91,17 | 77,82 | 90,12 | 77,95 | 90,23 | 78,40 | 91,52 | 78,84 | 90,20 | 79,40 | 92,80 | 80,59 | 92,80 | 80,59 |
| SMA/ sederajat | 78,02 | 59,17 | 80,89 | 59,95 | 82,84 | 60,37 | 80,68 | 60,67 | 79,94 | 60,84 | 85,23 | 61,25 | 85,23 | 61,65 |

Sumber: Indikator Pendidikan BPS Tahun 2021

Dari tabel di atas, bahwa APM dalam 6 tahun terakhir tidak menunjukkan kenaikan angka yang signifikan. Data menunjukkan bahwa penduduk usia 16-18 tahun yang tidak melanjutkan Jenjang SMA sekitar 38,35 %. APK SMP/SMA perlu menjadi perhatian khusus, mengingat seberapa besar pun bantuan pendidikan seperti BOS/KIP/lainnya diberikan belum terlalu berdampak pada kenaikan APK/APM. Perlu kajian mendalam terhadap capaian berbagai bantuan pendidikan. Penurunan APK sejalan dengan meningkatnya angka putus sekolah di setiap jenjang. APK SMA akan sangat tergantung dari APK di jenjang sebelumnya. Penurunan APK lebih banyak disebabkan selain masalah kemiskinan, yakni karena keterbatasan akses pendidikan terutama di daerah 3T/perbatasan.

Ada beberapa cara untuk meningkatkan APK/APM, diantaranya:

- Optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan menengah (misalkan bekerjasama dengan DUDI).
- Aksesibilitas pendidikan melalui pendidikan formal atau non formal.
- Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan infrastruktur di daerah yang memerlukannya.
- Pentingnya jaminan pendidikan daerah bagi siswa.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap wajib belajar 12 tahun.

Hakikatnya, masalah pembiayaan bantuan pendidikan merupakan masalah mendasar yang belum menyelesaikan pokok permasalahan lainnya, seperti peningkatan pengetahuan dan

keterampilan baru. Kualitas SDM rendah yang dihasilkan dunia pendidikan menjadi sebab utama mengapa pendidikan belum mampu menjawab dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Dalam kaitan dengan APK/APM dan ATS, maka fakta menunjukkan bahwa tidak adanya peningkatan APK/APM dan upaya menekah jumlah ATS, maka menjadi hal yang normal bahwa angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar kebawah, yakni 50,2 juta orang (39,7 persen). Namun tidak semua tenaga lulusan perguruan tinggi mempunyai kesiapan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja. Ketidaksesuaian keterampilan, perbedaan kualitas pendidikan antardaerah, keterbatasan talenta pendidikan dan siap kerja menjadi tantangan dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja (Lampiran RPJMN 2020-2024). BPS (2021) menyebutkan dari 139,81 juta penduduk, 37,41% atau 49,03 juta jiwa hanya tamat SD. Posisi dominan lainnya dalam angkatan kerja Indonesia adalah 18,8% atau 24,64 juta lulusan SMA. Selain itu, terdapat 18,54% atau 24,30 juta orang yang tamat SMA dan 16,16 juta orang tamatan SMK atau 12,33% dari total angkatan kerja di Indonesia. Fakta ini adalah sebab tidak tercapainya sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Keterbatasan akses menjadi sebab utama mengapa sebagian masyarakat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA (sederajat) memilih untuk bekerja atau berwirausaha dan menikah dini.

Jika merunut Berg (2017) bahwa lemahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh sebagian besar anak

miskin yang berada pada posisi yang tidak mendukung mereka secara permanen dibandingkan dibandingkan dengan mereka yang bersekolah di sekolah yang lebih makmur dan berkinerja lebih baik. Dokumen ini diambil dari sejumlah besar studi yang dilakukan untuk sebuah proyek besar dan merangkum bukti-bukti ini, yang menggambarkan bahwa sekolah berkualitas rendah berperan sebagai perangkat kemiskinan. Pengaruh sekolah miskin dan masyarakat miskin sulit dipisahkan secara statistik. Karena sebagian besar anak-anak bersekolah di dekat rumah mereka karena jarak dan biaya transportasi, sering terjadi tumpang tindih antara profil sosial ekonomi sekolah dan masyarakat tempat tinggal anak tersebut. Namun hal ini kurang benar di wilayah metropolitan, di mana anak-anak lebih banyak bergerak.

Kualitas pendidikan amat penting untuk memicu anak-anak yang berada di wilayah mengeluarkan potensi terbaiknya. Berdasarkan laporan OECD bahwa Guru SD di daerah terpencil/pedesaan kurang berkualitas dan sering absen dari sekolah dan Terdapat 75% SD yang gagal memenuhi standar pelayanan minimal seperti proporsi murid-guru yang tidak memadai dan fasilitas sekolah.

Seharusnya daerah 3T yang merupakan daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia perlu memikirkan bagaimana memacu anak-anak di daerah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tertinggi. Ketika akses pendidikan sudah tidak menjadi masalah, pemerintah perlu memikirkan menghadirkan guru-guru paling berkualitas di daerah yang dapat

dikatakan jauh dan terbelakang. Ekong (2006) berpendapat bahwa, kualitas membangun pengetahuan, keterampilan hidup, perspektif, sikap dan nilai. Ketika kualitas pendidikan yang disampaikan cukup tinggi untuk memenuhi standar yang ditetapkan, maka produk pendidikan harus dapat tampil dengan baik di dunia kerja dalam situasi kehidupan nyata. Ketika kualitas rendah, kinerja tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan telah menurun di bawah standar yang ditetapkan. Dengan pendidikan berkualitas, daerah akan mendapatkan input sumber daya manusia yang dapat menopang pembangunan daerah.

E. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Pelaksanaan bantuan sosial pendidikan seperti PIP dan BOS (BOP) masih diperlukan untuk meringankan kebutuhan siswa dalam memperoleh pendidikan.
- b. Terjadi peningkatan APK/APM selama program bantuan sosial pendidikan tersebut berlangsung, namun angka putus sekolah belum sepenuhnya berkurang dan APM siswa yang paling rendah ada di jenjang SMA/ sederajat di mana terdapat 38,5 % dari 100 % yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA/ sederajat.
- c. Ada beberapa keterbatasan dari program PIP dan BOS (BOP), yakni a) bantuan tersebut hanya menjawab permasalahan siswa yang berada di dalam sekolah, namun belum dapat menarik siswa untuk kembali ke sekolah, b) keterbatasan akses menjadi kendala paling besar dibandingkan

- Evaluasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Program Indonesia Pintar/ Bantuan Operasional Sekolah) dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Peningkatan Partisipasi Kasar/ Angka Partisipasi Murni (APK/APM) di Indonesia ●

masalah perekonomian (kemiskinan), c) Ketidaktepatan sasaran menyebabkan siswa yang selayaknya mendapatkan bantuan sosial pendidikan makin terpuruk kondisinya.

2. SARAN

- Pihak kementerian pendidikan maupun dinas pendidikan senantiasa memberikan arahan yang berkesinambungan ke satuan pendidikan yang melaksanakan PIP serta selalu melakukan mengevaluasi kinerja satuan pendidikan / sekolah dalam pelaksanaan PIP.
- Kementerian sosial maupun dinas sosial setempat selalu memperbaharui DTKS secara berkelanjutan demi menyesuaikan kondisi masyarakat yang status kesejahteraannya bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga mutu DTKS lebih akurat dalam ketepatan penerima PIP.
- Perlu dibentuknya tim khusus PIP di setiap sekolah yang melaksanakan PIP dengan dibuktikan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh kepala Satuan Pendidikan.
- Pihak satuan pendidikan/sekolah sebagai pelaksana PIP diharapkan melakukan seleksi calon peserta didik penerima PIP yang terstruktur dan sistematis, adanya wawancara dan verifikasi/survey ke rumah peserta didik
- Diharapkan dengan adanya PIP ini anak yang rentan untuk berhenti sekolah dikarenakan faktor kendala ekonomi agar dapat terbantu untuk tetap bersekolah.

REFERENSI

- Akbar A., Akbar A. (2021) EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMP NEGERI 5 KOTA PALOPO. Other thesis, Institut agama islam Negeri (IAIN Palopo).
- Asnawi, A. R., Wiyono, B. B., & Sunandar, A. (2021). Policy Evaluation of the Program Indonesia Pintar (PIP) in Indonesia's Education Outcomes. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(2), 556-566.
- Berg, Servaas & Burger, Cobus & Burger, Rulof & Vos, Mia & Rand, Gideon & Gustafsson, Martin & Moses, Eldridge & Shepherd, Debra & Spaul, Nicholas & Taylor, Stephen & Broekhuizen, Hendrik & Fintel, Dieter. (2011). Low Quality Education as a Poverty Trap. *SSRN Electronic Journal*. 10.2139/ssrn.2973766.
- Ekong, J. E. (2006) Standard in Education and Quality Delivery as Imperatives for National Productivity. *Nigerian Journal of Educational Philosophy*, 2 (2), 16 - 24
- Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 53-64. Retrieved from <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575>
<https://indobalinews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-881673414/dana-bos-di-tahun-2021-ada-yang-beda-dibanding-tahun-sebelumnya>

- <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/fokus/detail/program-indonesia-pintar-lima-tahun-luaskan-akses-pendidikan>
- https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/bukuelektronik/public/assets/img/flipbook/2021_Lensa_Pendidikan_Edisi_VI_FullPage.pdf
- <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Goal-4.pdf>
- Judith Bannett, *Evaluation Methods in Research* (London: MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, 2003, p. 57
- Kaelan, (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma
- Masita. 2015. "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong". *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3 No. 7, Juli 2015 hlm 77-85
- Muttaqin, Tatang & Wittek, Rafael & Heyse, Liesbet & Duijn, Marijtje. (2017). Why do children stay out school in Indonesia. *The Indonesian Journal on Development Planning*. 1. 93-108. [10.36574/jpp.v1i2.12](https://doi.org/10.36574/jpp.v1i2.12).
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Sholikhah, Ebni. (2019). *PEMANFAATAN DANA PROGRAM PINTAR (PIP) OLEH SISWA SMPN 2 GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. FOUNDASIA*. 9. 10.21831/foundasia.v9i1.26160.
- Theresia, Ni M. D. A., et al. "Evaluation Of Adequacy Of Bos In Improving The Quality Of Education." *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat*, vol. 10, no. 1, 2021, pp. 33-39, doi:10.22202/economica.2021.v10.i1.5041.
- Uriyalita, F., Syahrodi, J., Sumantra. (2020). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) Telaah Tentang Aksesibilitas, Pencegahan Dan Penanggulangan Anak Putus Sekolah di Wilayah Urban Fringe Harjamukti, Cirebon*. *Edum Journal*, 3(2), 179-199
- Wiratama, H. (2015). *Analisis Persebaran Dan Ketersediaan Sekolah Menengah Di Kota Tanjungbalai Tahun 2014*. Retrieved from <http://digilib.unimed.ac.id/22138/>